

TANTANGAN GLOBAL
PELUANG BARU
MASA DEPAN BERSAMA



IPB University
Inspiring Innovation
for a Better Tomorrow

People
Science
Innovation
for a Sustainable World

Dunia yang Bergeser— Ekonomi Politik Global Pasca-Globalisasi

*Membaca ulang pergeseran kekuasaan, perdagangan,
dan strategi negara di era pasca-globalisasi.*

FROM
HYPER-GLOBALIZATION
TO A MORE
MULTIPOLAR WORLD

US
EU
CHINA
GLOBAL SOUTH

TRADE
TECHNOLOGY
ENERGY
FOOD SECURITY
STRATEGIC AUTONOMY

A MORE
DIVERSE
AND RESILIENT
TOMORROW

TRADE
PEOPLE
PLANET
PROSPERITY

DIPLOMASI
UNTUK STABILITAS

*“Dunia tidak lagi
dihubungkan oleh satu pusat,
tetapi oleh banyak poros kekuatan.”*

Oleh:
Prof Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycct.com/cv.pdf

PERDAGANGAN
GLOBAL

INDUSTRI &
RANTAI PASOK

TEKNOLOGI &
EKONOMI DIGITAL

LOGISTIK &
INFRASTRUKTUR

DIPLOMASI &
GEOPOLITIK

TRANSISI
ENERGI

PERTUMBUHAN
INKLUSIF

KETAHANAN &
RESILIENSI

Perubahan global menuntut strategi nasional yang cerdas, tangguh, dan adaptif.

RudyCT Academic Series



LOKAL AKAR
GLOBAL WAWASAN
BERKELANJUTAN MASA DEPAN

IDEA | ANALISIS | SOLUSI | DAMPAK

Dunia yang Bergeser -- Ekonomi Politik Global Pasca-Globalisasi

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyc.com/cv.pdf

IPB University

Bogor, 2026

[RudyCT Academic Series](#)

Abstrak

Artikel ini menganalisis perubahan ekonomi politik global dari fase hiper-globalisasi menuju tatanan pasca-globalisasi yang lebih terfragmentasi, strategis, dan politis. Istilah pasca-globalisasi tidak digunakan untuk menyatakan berakhirnya perdagangan, investasi, mobilitas modal, atau jaringan produksi lintas negara. Sebaliknya, artikel ini menunjukkan bahwa integrasi ekonomi internasional tetap besar, tetapi logika yang mengaturnya berubah. Efisiensi biaya yang mendominasi era global value chains kini berhadapan dengan keamanan nasional, ketahanan rantai pasok, kedaulatan teknologi, transisi energi, kebijakan industri, kontrol data, dan rivalitas geopolitik. Perubahan ini terlihat pada meningkatnya penggunaan tarif, subsidi industri, kontrol ekspor, sanksi finansial, friend-shoring, de-risking, carbon border measures, dan pembatasan terhadap teknologi strategis. WTO pada 2026 mencatat pembaruan tanda fragmentasi perdagangan lintas blok geopolitik, sementara UNCTAD menunjukkan bahwa perdagangan dunia tetap mencapai rekor nilai tetapi berlangsung dalam lingkungan regulasi dan geopolitik yang semakin kompleks. Artikel mengintegrasikan teori political trilemma, geoeconomic fragmentation, weaponized interdependence, global value chains, strategic autonomy, industrial policy, dan geoekonomi sumber daya. Secara khusus dibahas rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, posisi Uni Eropa, perang dan keamanan energi, semikonduktor dan AI, mineral kritis, transformasi hijau, digital trade, sanksi, serta kebangkitan Global South. Bagi Indonesia, pasca-globalisasi membuka peluang bagi hilirisasi, diversifikasi pasar, investasi, penguatan ASEAN dan RCEP, serta pengembangan industri strategis, tetapi juga meningkatkan risiko ketergantungan teknologi, volatilitas komoditas, tekanan standar hijau, dan perlombaan subsidi. Argumen utama artikel adalah bahwa negara seperti Indonesia tidak perlu memilih antara keterbukaan dan kedaulatan secara biner. Strategi yang lebih tepat adalah open strategic resilience: tetap terbuka pada perdagangan dan investasi, tetapi membangun kapasitas domestik, diversifikasi hubungan, kemampuan teknologi, ketahanan pangan-energi, dan diplomasi ekonomi yang fleksibel. Artikel ditutup dengan skenario menuju 2035 dan agenda kebijakan untuk pemerintah, dunia usaha, serta pendidikan tinggi.

Kata Kunci

pasca-globalisasi; ekonomi politik global; geoeconomic fragmentation; de-risking; friend-shoring; global value chains; kebijakan industri; weaponized interdependence; strategic autonomy; perdagangan internasional; ASEAN; Indonesia; hilirisasi; AI; transisi hijau

Pendahuluan: Ketika Globalisasi Tidak Berakhir, tetapi Berubah Bentuk

Selama beberapa dekade setelah berakhirnya Perang Dingin, globalisasi sering digambarkan sebagai proses yang hampir tidak dapat dibalik. Perdagangan tumbuh lebih cepat daripada produk domestik bruto, perusahaan memecah proses produksi ke banyak negara, modal bergerak lintas batas, dan teknologi komunikasi membuat jarak ekonomi semakin pendek. Dalam imajinasi ekonomi arus utama, semakin dalam integrasi pasar akan semakin besar pula efisiensi yang diperoleh melalui spesialisasi, skala, dan kompetisi. Negara tetap penting, tetapi sering diposisikan sebagai pembuat aturan yang memungkinkan pasar global bekerja lebih lancar.

Memasuki dekade 2020-an, gambaran itu tidak lagi memadai. Pandemi memperlihatkan rapuhnya ketergantungan yang terlalu terkonsentrasi; perang Rusia-Ukraina mengubah energi, pangan, dan keuangan menjadi instrumen geopolitik; rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok menempatkan semikonduktor, AI, baterai, dan jaringan digital di pusat persaingan strategis; sedangkan transisi iklim menghadirkan aturan karbon baru yang secara langsung memengaruhi perdagangan. Pada 2025 Amerika Serikat menerapkan rezim tarif resiprokal yang luas, dan pada 2026 Uni Eropa memasuki fase definitif Carbon Border Adjustment Mechanism. Di sisi lain, perdagangan dunia tidak runtuh. UNCTAD memperkirakan nilai perdagangan global 2025 melampaui US\$35 triliun, sedangkan WTO pada Maret 2026 tetap menemukan jaringan perdagangan yang luas tetapi dengan tanda fragmentasi yang kembali menguat (UNCTAD, 2026a; WTO, 2026a).

Karena itu, “pasca-globalisasi” sebaiknya tidak dipahami sebagai deglobalisasi total. Istilah tersebut lebih tepat untuk menunjuk sebuah rezim baru: ekonomi global tetap saling bergantung, tetapi interdependensi kini dikelola dengan pertimbangan keamanan, daya tahan, teknologi, politik domestik, dan posisi geopolitik. Rantai pasok tidak dibongkar seluruhnya, melainkan disusun ulang. Negara tidak kembali ke autarki, tetapi menjadi lebih aktif memilih sektor strategis. Perusahaan tidak meninggalkan pasar global, tetapi semakin memperhitungkan risiko sanksi, blok politik, regulasi karbon, keamanan data, dan kemungkinan gangguan logistik.

Perubahan tersebut memiliki implikasi besar bagi Indonesia. Sebagai ekonomi terbuka, anggota G20, negara terbesar di ASEAN, produsen berbagai mineral strategis, serta pasar domestik yang besar, Indonesia menghadapi lingkungan yang lebih penuh peluang sekaligus lebih penuh tekanan. Dalam dunia yang bergeser, pertanyaan kuncinya bukan apakah Indonesia harus memilih globalisasi atau nasionalisme ekonomi, melainkan bagaimana membangun daya tawar, kapasitas domestik, dan fleksibilitas hubungan sehingga keterbukaan tidak berubah menjadi ketergantungan yang berbahaya.

1. Dari Hiper-Globalisasi ke Pasca-Globalisasi

Bagian ini membahas dari hiper-globalisasi ke pasca-globalisasi sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Hiper-globalisasi perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Fase sejak akhir 1980-an hingga sebelum krisis finansial global ditandai ekspansi rantai nilai, liberalisasi perdagangan, arus investasi lintas batas, dan keyakinan bahwa efisiensi dapat diperoleh dengan menempatkan setiap tahap produksi di lokasi termurah. Model ini menghasilkan penurunan biaya dan ekspansi perdagangan, tetapi juga memperbesar ketergantungan pada simpul logistik, pemasok, dan pasar tertentu. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa

yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi slowbalization memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Sesudah krisis finansial global 2008, rasio perdagangan terhadap PDB tidak lagi meningkat secepat dua dekade sebelumnya. Antras (2020) menilai perlambatan ini tidak otomatis berarti deglobalisasi, melainkan berakhirnya ekspansi yang luar biasa cepat. Perlambatan membuka ruang bagi negara dan perusahaan untuk menilai ulang biaya tersembunyi dari fragmentasi produksi. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan politik domestik. Tekanan terhadap globalisasi juga berakar pada distribusi manfaat yang tidak merata. Di banyak negara maju, guncangan impor dan dislokasi industri memberi bahan bakar pada populisme dan proteksionisme. Rodrik (2018) menunjukkan bahwa backlash politik terhadap globalisasi dapat dipahami dari ketegangan antara integrasi ekonomi dan legitimasi sosial. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, ketahanan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Pandemi, perang, dan gangguan logistik mengubah resiliency dari konsep operasional menjadi sasaran strategis. Persediaan, redundansi, multi-sourcing, dan kapasitas produksi domestik memperoleh nilai yang sebelumnya dianggap sebagai inefisiensi. Perusahaan mulai mengoptimalkan bukan hanya biaya rata-rata tetapi juga risiko ekor yang jarang terjadi namun sangat mahal. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap pasca-globalisasi menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Ciri utama era baru bukan berhentinya arus lintas batas, melainkan berubahnya kriteria keputusan ekonomi. Keamanan, politik, karbon, data, dan teknologi ikut menentukan lokasi investasi. Dengan demikian, pasca-globalisasi adalah globalisasi yang dipolitisasi dan dikelola secara lebih strategis. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang

menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

2. Political Trilemma dan Kembalinya Negara

Bagian ini membahas political trilemma dan kembalinya negara sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Trilemma perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Rodrik (2000) merumuskan ketegangan antara integrasi ekonomi mendalam, kedaulatan negara, dan demokrasi massa. Era hiper-globalisasi menekan ruang kebijakan nasional karena aturan dan pasar internasional semakin menentukan pilihan domestik. Pasca-globalisasi memperlihatkan upaya negara merebut kembali policy space, khususnya pada teknologi, industri, energi, dan keamanan. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi legitimasi memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Keterbukaan yang tidak disertai kompensasi sosial dapat kehilangan dukungan politik. Ketika komunitas tertentu menanggung kehilangan pekerjaan sementara manfaat tersebar luas dan abstrak, koalisi anti-globalisasi menjadi mudah terbentuk. Kebijakan industri dan proteksi kini sering dibenarkan sebagai cara mengembalikan pekerjaan dan kapasitas produksi. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan negara strategis. Pemerintah kembali memilih sektor prioritas: semikonduktor, baterai, energi bersih, pertahanan, pangan, farmasi, dan infrastruktur digital. Kebijakan tersebut melampaui pendekatan horizontal yang hanya memperbaiki iklim usaha. Negara berusaha membentuk struktur produksi, bukan sekadar mengoreksi kegagalan pasar setelah terjadi. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, risiko government failure tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Kebangkitan kebijakan industri juga menghidupkan masalah lama: rent-seeking, salah pilih sektor, perlombaan subsidi, dan pemborosan fiskal. OECD (2025) menemukan bahwa subsidi dapat meningkatkan pangsa pasar perusahaan tetapi tidak selalu meningkatkan investasi atau produktivitas. Karena itu kebijakan industri perlu discipline, sunset clause, evaluasi, dan persaingan. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap negosiasi baru menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Hubungan negara-pasar tidak kembali ke model proteksionisme abad ke-20. Perusahaan global tetap penting karena menguasai teknologi, data, jaringan pelanggan, dan modal. Ekonomi politik baru adalah negosiasi terus-menerus antara negara yang ingin mengamankan kapasitas dan korporasi yang ingin mempertahankan fleksibilitas global. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

3. Geoeconomic Fragmentation: Ketika Geopolitik Mengatur Arus Ekonomi

Bagian ini membahas geoeconomic fragmentation: ketika geopolitik mengatur arus ekonomi sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Definisi perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. IMF menggunakan istilah geoeconomic fragmentation untuk menggambarkan pembalikan atau pengalihan integrasi lintas negara yang didorong terutama oleh tujuan strategis dan geopolitik, bukan sekadar oleh perubahan harga atau teknologi. Fragmentasi dapat bekerja melalui perdagangan, investasi, migrasi, pembayaran, teknologi, dan aliran data. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi bukti perdagangan memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. WTO pada Maret 2026 mencatat bahwa perdagangan antarblok geopolitik tumbuh sekitar empat persen lebih lambat daripada perdagangan di

dalam blok, dan data 2025 menunjukkan pelebaran kembali fragmentasi terutama terkait ketegangan AS-Tiongkok (WTO, 2026a). Bukti ini lebih konsisten dengan selective decoupling daripada pemisahan total. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan biaya. Fragmentasi mengurangi efisiensi karena perusahaan kehilangan akses pada pemasok paling produktif, pasar modal paling murah, atau teknologi terbaik. IMF memperingatkan bahwa dampaknya cenderung lebih berat bagi negara berpendapatan rendah yang memiliki opsi diversifikasi lebih sedikit. Biaya global meningkat ketika duplikasi kapasitas menjadi konsekuensi strategi keamanan. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, peluang pihak ketiga tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Fragmentasi tidak hanya menciptakan kerugian. Negara yang dipandang netral atau memiliki akses ke beberapa blok dapat memperoleh trade diversion, relokasi investasi, dan fungsi sebagai production hub. Namun keuntungan tersebut dapat sementara bila negara hanya menjadi perantara tanpa memperdalam kapabilitas domestik. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap kebijakan menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Respons yang rasional bukan mengejar netralitas pasif, melainkan membangun pilihan. Infrastruktur, perjanjian dagang, standarisasi, diplomasi, dan teknologi menentukan apakah suatu negara dapat memanfaatkan pengalihan rantai nilai. Strategic optionality menjadi aset ekonomi politik penting. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

4. Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok sebagai Sumbu Utama

Bagian ini membahas rivalitas amerika serikat-tiongkok sebagai sumbu utama sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Tarif dan teknologi perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Persaingan AS-Tiongkok telah bergeser dari perang tarif menjadi kompetisi yang mencakup semikonduktor, AI, telekomunikasi, kendaraan listrik, baterai, investasi, dan standar teknologi. Objek persaingan bukan hanya neraca perdagangan, tetapi kontrol atas technological chokepoints dan industri masa depan. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi tarif resiprokal 2025 memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Pada April 2025 Amerika Serikat mengumumkan tarif tambahan umum 10 persen atas sebagian besar impor dengan tarif negara-spesifik tertentu, dibingkai sebagai respons terhadap defisit perdagangan dan kerentanan kapasitas industri (White House, 2025). Langkah tersebut menegaskan bahwa perdagangan telah secara eksplisit dihubungkan dengan keamanan nasional. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan china plus one. Banyak perusahaan mengurangi konsentrasi produksi di Tiongkok tanpa meninggalkan pasar Tiongkok. ASEAN, India, Meksiko, dan negara lain menerima sebagian investasi dari strategi China-plus-one. Relokasi ini memperkuat multipolaritas produksi tetapi tidak menghapus ketergantungan pada input dan jaringan Tiongkok. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, skala tiongkok tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Tiongkok mempertahankan kekuatan pada manufaktur berskala besar, jaringan pemasok, infrastruktur, dan pasar domestik. Keunggulan ini sulit direplikasi hanya dengan insentif fiskal. Karena itu decoupling penuh akan sangat mahal bagi perusahaan dan konsumen global. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah

opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap implikasi asia menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Asia Tenggara berada dekat pusat tarikan kedua ekonomi. Negara ASEAN memperoleh peluang investasi tetapi juga menghadapi tekanan rules of origin, transshipment, dan pilihan teknologi. Kemampuan ASEAN menjaga keterbukaan sambil memperkuat aturan regional akan menentukan ruang manuvernya. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

5. Uni Eropa, Strategic Autonomy, dan Regulasi sebagai Kekuatan

Bagian ini membahas uni eropa, strategic autonomy, dan regulasi sebagai kekuatan sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Autonomi strategis perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Uni Eropa merespons ketidakpastian global dengan konsep open strategic autonomy: mempertahankan keterbukaan tetapi mengurangi ketergantungan yang dianggap berisiko pada energi, bahan baku, kesehatan, dan teknologi. Pendekatan ini menggabungkan kebijakan perdagangan, industri, kompetisi, dan keamanan ekonomi. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi brussels effect memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Kekuatan pasar Eropa membuat regulasinya memiliki dampak ekstrateritorial. Perusahaan yang ingin menjual ke pasar Eropa sering menyesuaikan standar global mereka terhadap aturan Uni Eropa. Regulasi menjadi bentuk kekuasaan ekonomi setara dengan tarif atau subsidi. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak

lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan cbam. Fase definitif Carbon Border Adjustment Mechanism berlaku sejak 1 Januari 2026 untuk barang tertentu yang intensif karbon. Importir di atas ambang yang ditentukan harus memenuhi kewajiban deklarasi dan sertifikat karbon (European Commission, 2026). Bagi eksportir berkembang, kepatuhan karbon berubah dari isu lingkungan menjadi syarat akses pasar. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, de-risking tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Eropa lebih sering menggunakan istilah de-risking daripada decoupling terhadap Tiongkok. Tujuannya mengurangi ketergantungan kritis tanpa memutus perdagangan luas. Perbedaan istilah ini penting karena menunjukkan preferensi pada diversifikasi dan screening daripada pemisahan blok secara total. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap Indonesia menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Indonesia perlu membaca regulasi Eropa sebagai sinyal bahwa daya saing masa depan semakin bergantung pada traceability, emisi, deforestasi, dan tata kelola rantai pasok. Investasi pada MRV, energi bersih, dan standardisasi dapat menjadi strategi dagang, bukan sekadar agenda lingkungan. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

6. Perang, Energi, dan Geopolitik Infrastruktur

Bagian ini membahas perang, energi, dan geopolitik infrastruktur sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklus dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Energi sebagai instrumen perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Invasi Rusia ke Ukraina memperlihatkan bagaimana ketergantungan energi dapat menjadi leverage strategis. Eropa mempercepat diversifikasi gas, LNG, energi terbarukan, dan efisiensi setelah pasokan Rusia menurun. Harga energi menjadi

mekanisme transmisi konflik ke inflasi dan industri global. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi infrastruktur memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Pipa, pelabuhan, jalur pelayaran, terminal LNG, kabel bawah laut, dan jaringan listrik memperoleh nilai geopolitik baru. Infrastruktur bukan hanya aset ekonomi, tetapi menentukan siapa bergantung pada siapa. Investasi konektivitas karenanya semakin terkait dengan kebijakan luar negeri. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan hormuz dan shipping. UNCTAD pada pertengahan 2026 mencatat tekanan biaya energi, transportasi, dan logistik akibat gangguan pelayaran melalui Selat Hormuz serta kekhawatiran pasokan energi (UNCTAD, 2026b). Kejadian ini mengingatkan bahwa perdagangan global tetap sangat bergantung pada chokepoints fisik. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, energi bersih tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Transisi energi tidak menghapus geopolitik energi; ia mengubah objeknya. Persaingan bergeser menuju lithium, nikel, kobalt, rare earths, copper, baterai, grid, dan teknologi pemrosesan. Negara produsen mineral memperoleh leverage baru tetapi menghadapi risiko ketergantungan komoditas bentuk baru. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap ketahanan menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Energy security kini memerlukan portofolio: diversifikasi sumber, kapasitas domestik, interkoneksi, penyimpanan, efisiensi, dan fleksibilitas permintaan. Strategi tersebut menuntut investasi jangka panjang yang harus diseimbangkan dengan affordability. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan

panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

7. Global Value Chains: Dari Just-in-Time ke Just-in-Case

Bagian ini membahas global value chains: dari just-in-time ke just-in-case sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Efisiensi lama perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Global value chains dibangun dengan prinsip fragmentasi produksi: perusahaan menempatkan setiap aktivitas di lokasi yang paling efisien dan mengoordinasikannya melalui logistik serta teknologi informasi. Model ini menurunkan inventori dan biaya, tetapi membuat gangguan pada satu simpul dapat menjalar cepat. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi rekonfigurasi memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Laporan Global Value Chain Development 2025 menemukan bukti rerouting melalui intermediary channels serta fragmentasi geopolitik pada beberapa wilayah, meskipun regionalisasi universal tidak terlihat (WTO et al., 2025). Rantai nilai bukan hilang, melainkan menjadi lebih berlapis dan politis. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan redundansi. Perusahaan menambah pemasok kedua, kapasitas cadangan, inventory, dan kontrak alternatif. Secara akuntansi langkah ini tampak lebih mahal, tetapi secara risk-adjusted dapat lebih efisien. Ketangguhan menjadi bagian dari fungsi produksi modern. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, regionalisasi selektif tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Beberapa industri mengalami nearshoring atau regionalisasi karena berat barang, kebutuhan waktu cepat, atau subsidi domestik. Industri lain tetap global karena skala dan spesialisasi pemasok. Tidak ada satu arah tunggal untuk semua sektor. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap Indonesia menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Indonesia dapat masuk ke GVC yang direkonfigurasi jika mampu menawarkan kepastian aturan, energi andal, tenaga terampil, pelabuhan efisien, dan pemasok lokal yang memenuhi standar. Insentif investasi tanpa ekosistem produktif hanya menghasilkan enclave dengan spillover terbatas. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

8. Friend-shoring, Nearshoring, dan De-risking

Bagian ini membahas friend-shoring, nearshoring, dan de-risking sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Friend-shoring perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Friend-shoring mengarahkan rantai pasok ke negara yang dipandang sebagai mitra politik atau keamanan. Logikanya adalah mengurangi risiko coercion dan gangguan ketika hubungan geopolitik memburuk. Namun definisi “friend” dapat berubah ketika pemerintahan dan kepentingan nasional berubah. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi nearshoring memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Nearshoring menekankan kedekatan geografis untuk memperpendek waktu pengiriman dan mengurangi risiko transportasi. Meksiko, Eropa Timur, dan kawasan regional tertentu memperoleh manfaat dari tren ini. Kedekatan saja tidak cukup tanpa kapasitas industri dan perjanjian pasar. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang

bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan de-risking. De-risking lebih lentur: perusahaan tetap beroperasi pada pasar besar tetapi mengurangi konsentrasi pada komponen kritis. Pendekatan ini lebih realistis dibanding decoupling luas. Ia menggeser manajemen rantai pasok dari minimisasi biaya menuju optimasi portofolio risiko. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, risiko fragmentasi tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Jika setiap negara mendefinisikan keamanan secara luas, friend-shoring dapat berkembang menjadi proteksionisme yang membelah pasar global. WTO memperingatkan fragmentasi blok dapat menimbulkan kehilangan output global yang besar. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap asean menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. ASEAN dapat menjadi penerima diversifikasi karena mempertahankan hubungan ekonomi dengan banyak pihak. Tetapi keuntungan terbesar hanya muncul jika investasi asing terhubung dengan pemasok, keterampilan, dan inovasi lokal. Kebijakan domestik menentukan apakah friend-shoring menjadi industrial upgrading atau sekadar relokasi assembling. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

9. Semikonduktor, AI, dan Chokepoints Teknologi

Bagian ini membahas semikonduktor, ai, dan chokepoints teknologi sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Semikonduktor perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Chip merupakan contoh sempurna interdependensi strategis: desain, perangkat lunak, alat litografi, material, fabrikasi, packaging, dan pasar tersebar di beberapa ekonomi dengan konsentrasi tinggi. Tidak ada negara yang sepenuhnya mandiri pada seluruh rantai. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi kontrol ekspor memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Pembatasan ekspor terhadap chip canggih dan peralatan produksi digunakan untuk memperlambat kemampuan teknologi pesaing. Hal ini memperlihatkan perpindahan kebijakan perdagangan ke wilayah keamanan. Perusahaan harus memperhitungkan *nationality of technology, end-use, dan end-user*. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga *reliability, compliance, traceability*, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan *ai compute*. AI generatif meningkatkan pentingnya GPU, pusat data, listrik, cloud, dan model frontier. Konsentrasi *compute* menciptakan bentuk ketergantungan baru yang tidak selalu terlihat dalam statistik perdagangan barang. Kekuatan ekonomi digital terkait akses pada infrastruktur komputasi. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada *chokepoint* tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya *data dependency*. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, *lead time*, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, *sovereign ai* tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Banyak negara mulai membahas *sovereign AI* untuk menjaga kapasitas data, bahasa, keamanan, dan pelayanan publik. Tetapi kedaulatan penuh mahal dan mungkin tidak efisien bagi ekonomi menengah. Pendekatan federatif dan kerja sama regional dapat menjadi alternatif. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah *hurdle rate*, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap Indonesia menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Prioritas Indonesia bukan meniru seluruh rantai semikonduktor, melainkan memilih *niche* yang realistis: desain tertentu, packaging, *electronics manufacturing services*, data center, AI applications, dan talenta. Strategi teknologi perlu mengikuti

comparative capability yang dapat dibangun, bukan simbolisme. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

10. Mineral Kritis dan Geoekonomi Transisi Hijau

Bagian ini membahas mineral kritis dan geoekonomi transisi hijau sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Mineral perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Dekarbonisasi meningkatkan permintaan atas mineral untuk baterai, kendaraan listrik, jaringan, turbin, dan penyimpanan. Konsentrasi produksi dan pemrosesan membuat mineral kritis rentan terhadap fragmentasi. IMF menunjukkan pasar mineral transisi energi termasuk yang paling rentan jika perdagangan terbelah menjadi blok (Alvarez et al., 2023). Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi nikel Indonesia memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Indonesia memiliki posisi penting pada nikel dan menggunakan kebijakan hilirisasi untuk mendorong pemrosesan domestik, investasi smelter, dan ekosistem baterai. Strategi ini meningkatkan nilai tambah, tetapi keberlanjutan jangka panjang bergantung pada teknologi, energi, lingkungan, dan diversifikasi produk. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan bargaining power. Negara pemilik sumber daya dapat menggunakan akses mineral untuk menarik investasi dan transfer kemampuan. Tetapi daya tawar menurun bila hanya satu pembeli atau teknologi pemrosesan tertentu mendominasi. Diversifikasi mitra dan transparansi kontrak menjadi penting. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency.

Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, standar hijau tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Ironisnya, mineral untuk transisi hijau dapat diproduksi dengan emisi tinggi atau dampak sosial besar. Pasar utama semakin menuntut traceability dan intensitas karbon yang lebih rendah. Keunggulan mineral perlu digabung dengan listrik bersih dan tata kelola lingkungan. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap strategi menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Tujuan kebijakan tidak seharusnya berhenti pada smelter. Downstream knowledge, recycling, material science, engineering services, dan circular economy menentukan apakah negara naik kelas. Hilirisasi yang sukses adalah proses pembelajaran industri, bukan sekadar perubahan HS code ekspor. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

11. Kebangkitan Kebijakan Industri dan Perlombaan Subsidi

Bagian ini membahas kebangkitan kebijakan industri dan perlombaan subsidi sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Industrial policy perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, dan negara lain memperluas kebijakan industri untuk chip, baterai, energi bersih, dan manufaktur strategis. Kebijakan yang dulu sering dianggap distorsif kini dibenarkan dengan argumen keamanan, iklim, dan teknologi. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi subsidy race memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Ketika banyak negara memberi insentif, lokasi investasi dipengaruhi kapasitas fiskal. Ekonomi berkembang dapat kesulitan bersaing dengan paket subsidi negara kaya. Perlombaan ini berpotensi menggeser investasi dari lokasi paling produktif ke lokasi

dengan dukungan terbesar. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan evidence. Studi OECD 2025 menemukan subsidi pada perusahaan manufaktur besar berkaitan dengan kenaikan pangsa pasar global, tetapi tidak menunjukkan peningkatan investasi atau produktivitas secara konsisten (OECD, 2025). Hasil tersebut memperingatkan bahwa market share bukan indikator cukup untuk menilai keberhasilan kebijakan. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, discipline tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Kebijakan industri membutuhkan target terukur, kompetisi, conditionality, sunset clause, dan evaluasi independen. Bantuan yang permanen menciptakan ketergantungan dan rent-seeking. Negara perlu mampu menghentikan dukungan kepada proyek yang gagal. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap Indonesia menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Karena ruang fiskal terbatas, Indonesia harus lebih selektif. Keunggulan utama dapat berasal dari pasar, sumber daya, reformasi perizinan, kawasan industri, tenaga kerja, dan infrastruktur, bukan hanya subsidi tunai. Kualitas institusi menjadi pembeda dalam kompetisi investasi. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

12. Weaponized Interdependence: Jaringan sebagai Sumber Kekuasaan

Bagian ini membahas weaponized interdependence: jaringan sebagai sumber kekuasaan sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan,

lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Network power perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Farrell dan Newman (2019) menjelaskan bahwa jaringan global yang tampak terdesentralisasi sering memiliki hub dominan. Negara yang menguasai hub dapat memperoleh informasi atau membatasi akses pihak lain. Kekuatan berasal dari topologi jaringan, bukan hanya ukuran PDB. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi keuangan memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Dominasi dolar, sistem perbankan koresponden, dan infrastruktur pembayaran membuat sanksi finansial memiliki jangkauan yang luas. Perusahaan di negara ketiga dapat terkena dampak karena transaksi mereka melewati jaringan yang dikendalikan yurisdiksi tertentu. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan teknologi. Chokepoints juga terdapat pada software, cloud, chip design, operating systems, dan alat produksi. Lisensi atau kontrol ekspor dapat mengubah struktur kompetisi global. Kemandirian teknologi menjadi isu keamanan ekonomi. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, data tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Platform digital memusatkan data dan akses pasar. Negara mulai memperhatikan data localization, cross-border data flows, dan cloud sovereignty. Interdependensi digital menciptakan efisiensi sekaligus kemampuan coercion. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap respon menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Tidak semua ketergantungan harus dihilangkan. Strategi yang lebih rasional adalah mengidentifikasi dependency yang benar-benar kritis, membangun substitusi, dan menjaga interoperability. Over-securitization justru dapat menghancurkan manfaat jaringan yang dibutuhkan ekonomi. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

13. Sanksi, Mata Uang, dan Fragmentasi Finansial

Bagian ini membahas sanksi, mata uang, dan fragmentasi finansial sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Sanksi perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Sanksi finansial dan pembekuan aset dalam konflik geopolitik memperlihatkan bahwa cadangan devisa, akses bank, dan transaksi lintas batas dapat menjadi instrumen tekanan. Perusahaan kini menilai risiko yurisdiksi selain risiko pasar. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi dollar system memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Dolar tetap dominan karena kedalaman pasar, likuiditas, institusi, dan network effects. Upaya diversifikasi cadangan tidak secara otomatis menggantikan fungsi sistem dolar. Namun penggunaan sanksi meningkatkan insentif beberapa negara mencari mekanisme alternatif. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan local currency. Perdagangan dengan mata uang lokal dapat mengurangi sebagian risiko kurs dan ketergantungan pembayaran, khususnya dalam hubungan regional. Efektivitasnya tetap bergantung pada likuiditas, hedging, dan kepercayaan makroekonomi. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan

perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, capital flows tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Fragmentasi investasi dapat menaikkan cost of capital dan mengurangi diversifikasi portofolio global. Negara emerging market berisiko mengalami volatilitas lebih tinggi ketika investor memisahkan risiko geopolitik dari fundamental ekonomi. Stabilitas domestik menjadi premium yang semakin berharga. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap Indonesia menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Indonesia berkepentingan memperdalam pasar keuangan domestik, memperluas penggunaan mata uang lokal secara pragmatis, dan menjaga kredibilitas kebijakan makro. Tujuannya bukan keluar dari sistem global, tetapi memperbesar opsi ketika terjadi gangguan. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

14. Digital Trade, Data, dan Regulasi yang Terfragmentasi

Bagian ini membahas digital trade, data, dan regulasi yang terfragmentasi sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Services perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. UNCTAD pada September 2026 mencatat jasa mencapai 27 persen ekspor global pada 2025, sedangkan jasa yang dapat disampaikan secara digital mencapai 56 persen ekspor jasa (UNCTAD, 2026c). Perdagangan masa depan semakin tidak terlihat dalam kontainer tetapi mengalir melalui jaringan data. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi rules gap memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Aturan multilateral jasa dibangun sebelum era cloud, platform, AI, dan cross-border data. Perjanjian bilateral dan regional kemudian mengisi kekosongan dengan aturan yang tidak selalu kompatibel. Fragmentasi regulasi digital dapat menjadi trade cost baru. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan data sovereignty. Negara ingin melindungi privasi, keamanan, dan akses penegak hukum, tetapi pembatasan data yang berlebihan dapat menghambat skala dan inovasi. Tantangannya adalah menemukan interoperabilitas antarrezim perlindungan. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, ai divide tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. UNCTAD memperingatkan bahwa compute, data, pembiayaan, dan keahlian AI terkonsentrasi pada sedikit negara dan perusahaan, sehingga AI dapat memperdalam kesenjangan digital. Akses teknologi menjadi isu pembangunan sekaligus perdagangan. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap indonesia menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Indonesia perlu memperkuat data governance, cybersecurity, cloud capacity, digital skills, dan aturan cross-border data yang konsisten dengan perlindungan dan integrasi ASEAN. Ekonomi digital akan menjadi salah satu arena utama diplomasi ekonomi. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

15. Transisi Hijau sebagai Arena Ekonomi Politik Global

Bagian ini membahas transisi hijau sebagai arena ekonomi politik global sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian

tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Green industrial policy perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Dekarbonisasi melahirkan dukungan besar pada energi terbarukan, kendaraan listrik, baterai, hidrogen, dan teknologi rendah karbon. Kebijakan iklim dan industri semakin menyatu. Negara berlomba menguasai industri hijau sebelum pasar matang. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi carbon border memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. CBAM Eropa menunjukkan bahwa kebijakan iklim dapat mengubah syarat perdagangan. Intensitas emisi embedded di produk menjadi informasi ekonomi yang menentukan biaya akses pasar. Eksportir yang tidak mampu mengukur emisi menghadapi disadvantages baru. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan standards competition. Taksonomi hijau, disclosure, methane rules, dan traceability berkembang berbeda antarwilayah. Standar dapat mendorong perbaikan lingkungan tetapi juga berfungsi sebagai non-tariff barrier bila kapasitas kepatuhan timpang. Negara berkembang membutuhkan pembiayaan dan teknologi untuk menutup compliance gap. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, just transition tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Transisi hijau menciptakan pemenang dan pihak terdampak: pekerja fosil, daerah tambang, konsumen energi, dan industri padat karbon. Legitimasi politik memerlukan mekanisme kompensasi dan reskilling. Tanpa keadilan, kebijakan iklim dapat memicu backlash. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya.

Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap Indonesia menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Indonesia perlu menggabungkan hilirisasi mineral dengan elektrifikasi bersih, pembangunan grid, renewable energy, dan standar emisi yang kredibel. Dengan cara itu, keunggulan sumber daya dapat bertahan ketika pasar global menjadi lebih carbon-conscious. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

16. Pangan, Pertanian, dan Kedaulatan dalam Pasca-Globalisasi

Bagian ini membahas pangan, pertanian, dan kedaulatan dalam pasca-globalisasi sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Food security perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Pandemi, perang, dan pembatasan ekspor memperlihatkan bahwa pangan memiliki dimensi keamanan nasional. Negara meningkatkan perhatian pada stok, produksi domestik, diversifikasi impor, dan stabilisasi harga. Pasar global tetap penting tetapi tidak lagi dianggap selalu tersedia tanpa gangguan. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi export restrictions memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Ketika harga pangan naik, beberapa negara membatasi ekspor untuk melindungi konsumen domestik. Secara individual kebijakan ini rasional, tetapi secara kolektif dapat memperburuk volatilitas global. Inilah dilema koordinasi klasik dalam ekonomi politik pangan. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan climate. Perubahan iklim meningkatkan korelasi risiko produksi di berbagai wilayah dan menambah tekanan pada perdagangan pangan. Ketahanan membutuhkan investasi varietas, irigasi, data cuaca, storage, dan logistik. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang

dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, input dependence tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Kedaulatan pangan bukan hanya soal beras atau gandum; pupuk, benih, energi, mesin, dan logistik juga merupakan dependency strategis. Negara perlu memetakan seluruh sistem input-output pangan. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap Indonesia menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Bagi Indonesia, kebijakan pangan perlu menghindari dua ekstrem: autarki yang mahal dan ketergantungan impor yang rapuh. Diversifikasi pangan lokal serta perdagangan yang terkelola dapat saling melengkapi. Ketahanan berasal dari portofolio sumber, bukan satu instrumen. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

17. Global South, BRICS, dan Multipolaritas Ekonomi

Bagian ini membahas global south, brics, dan multipolaritas ekonomi sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Multipolarity perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Pertumbuhan Asia dan negara berkembang mengurangi dominasi ekonomi Atlantik. Negara Global South memperoleh bobot lebih besar dalam perdagangan, komoditas, demografi, dan permintaan. Namun peningkatan ukuran tidak selalu sama dengan peningkatan rule-making power. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila

perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi brics memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Perluasan BRICS mencerminkan keinginan sebagian negara memperbesar representasi dan membangun forum di luar institusi Barat. BRICS bukan blok homogen; kepentingan perdagangan, keamanan, dan politik anggotanya sangat beragam. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan south-south trade. Perdagangan Selatan-Selatan berkembang, terutama melalui hubungan Asia dengan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Hal ini membuka diversifikasi pasar bagi negara berkembang, tetapi juga menciptakan dependency baru terhadap pusat permintaan tertentu. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, development finance tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Bank pembangunan, sovereign funds, dan pembiayaan infrastruktur dari berbagai sumber memperluas opsi negara berkembang. Kompetisi pembiayaan dapat meningkatkan daya tawar bila negara memiliki kapasitas appraisal dan kontrak yang kuat. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap indonesia menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Indonesia dapat memanfaatkan multipolaritas dengan menjaga hubungan luas dan tidak mengikat strategi ekonominya pada satu pusat kekuatan. Kebijakan bebas-aktif memperoleh dimensi geoekonomi yang semakin nyata. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

18. ASEAN, RCEP, dan Regionalisme Terbuka

Bagian ini membahas asean, rcep, dan regionalisme terbuka sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

ASEAN centrality perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. ASEAN berusaha mempertahankan sentralitas di tengah rivalitas besar melalui forum inklusif dan keterbukaan pada berbagai mitra. Kekuatan ASEAN berasal bukan dari keseragaman politik, tetapi dari kemampuannya menjadi platform regional. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi rcep memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. RCEP menghubungkan ekonomi Asia Timur dalam kerangka rules of origin dan liberalisasi yang dapat mempermudah jaringan produksi regional. Di dunia terfragmentasi, perjanjian luas seperti RCEP menjadi aset karena menjaga opsi supply chain. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan afta and integration. Integrasi ASEAN masih menghadapi hambatan non-tarif, perbedaan standar, logistik, dan kesenjangan pembangunan. Pasar regional yang lebih dalam akan meningkatkan daya tawar terhadap perusahaan dan kekuatan besar. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, digital economy tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. ASEAN juga bergerak pada kerangka ekonomi digital yang berpotensi mengurangi friksi data, pembayaran, identitas, dan layanan. Interoperabilitas digital dapat menjadi fondasi regionalisasi jasa. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik

yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap Indonesia leadership menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Sebagai ekonomi terbesar ASEAN, Indonesia memiliki kepentingan besar memastikan kawasan tidak terbelah menjadi sphere of influence yang saling eksklusif. Kepemimpinan membutuhkan konsistensi antara diplomasi regional dan reformasi domestik. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

19. Multilateralisme dan Masa Depan WTO

Bagian ini membahas multilateralisme dan masa depan WTO sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

WTO relevance perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Meskipun aturan global menghadapi tekanan, sekitar tiga perempat perdagangan barang dunia masih berjalan di bawah tarif most-favoured-nation WTO menurut laporan tahunan 2025. Institusi multilateral tetap menjadi baseline yang mencegah seluruh hubungan dagang kembali pada power politics. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi dispute settlement memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Krisis mekanisme penyelesaian sengketa melemahkan enforceability aturan. Tanpa proses yang kredibel, negara besar memiliki ruang lebih luas menggunakan tindakan unilateral. Reformasi kelembagaan menjadi isu inti masa depan WTO. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan security exception. Penggunaan alasan keamanan nasional dalam perdagangan meningkat. Bila definisinya terlalu luas, hampir setiap sektor dapat dikeluarkan dari disiplin perdagangan. Batas antara legitimate security dan protectionism menjadi semakin sulit. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya

dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, plurilateralism tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Sebagian kemajuan berpindah ke perjanjian plurilateral dan regional karena konsensus penuh sulit dicapai. Model ini lebih fleksibel tetapi berisiko menciptakan rule fragmentation dan mengecualikan negara berkapasitas rendah. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap Indonesia menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Indonesia berkepentingan mempertahankan WTO sambil aktif pada ASEAN, RCEP, dan perjanjian lain. Multilayered trade diplomacy lebih sesuai dengan tatanan yang kompleks. Satu forum tidak lagi cukup untuk mengelola semua kepentingan. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

20. Korporasi Multinasional di Era Risiko Geopolitik

Bagian ini membahas korporasi multinasional di era risiko geopolitik sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Boardroom geopolitics perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Geopolitik kini menjadi agenda dewan direksi karena keputusan investasi dapat terpengaruh sanksi, tarif, kontrol ekspor, dan perubahan aliansi. Scenario planning memperoleh tempat di samping analisis biaya tradisional. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi localization memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Perusahaan meningkatkan local-for-local production pada pasar besar untuk mengurangi tarif, logistik, dan exposure politik. Akibatnya, organisasi multinasional dapat menjadi lebih federatif dan kurang tersentralisasi. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan compliance. Perusahaan harus memantau rules of origin, sanctions lists, forced labor rules, carbon disclosure, cybersecurity, dan data localization. Biaya compliance menjadi bagian besar dari international business strategy. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, capital allocation tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Investasi tidak hanya dinilai berdasarkan net present value, tetapi juga reversibility, political risk, supply-chain optionality, dan access to incentives. Risk-adjusted return berubah karena probabilitas gangguan struktural meningkat. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap management menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Pemimpin perusahaan perlu menggabungkan operasi, legal, public affairs, cybersecurity, procurement, dan sustainability dalam keputusan strategis. Silo fungsional menjadi berbahaya ketika risiko saling berinteraksi. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

21. Tenaga Kerja, Ketimpangan, dan Politik Perlindungan

Bagian ini membahas tenaga kerja, ketimpangan, dan politik perlindungan sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan,

dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Adjustment costs perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Perdagangan dan teknologi menghasilkan manfaat agregat tetapi biaya penyesuaian terkonsentrasi pada sektor dan komunitas tertentu. Ketika kompensasi lambat, dukungan politik terhadap keterbukaan melemah. Ekonomi politik menentukan apakah transformasi dipandang sebagai peluang atau ancaman. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi reshoring jobs memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Janji reshoring sering dikaitkan dengan penciptaan kerja, tetapi manufaktur modern lebih otomatis dan tidak selalu menghasilkan pekerjaan sebanyak era sebelumnya. Kualitas dan skill intensity pekerjaan menjadi lebih penting daripada jumlah pabrik. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan reskilling. Pasca-globalisasi dan AI sama-sama mengubah tugas. Pekerja memerlukan sistem pembelajaran sepanjang hayat, bukan pelatihan sekali sebelum masuk pasar kerja. Social protection perlu mendukung mobilitas, bukan mempertahankan pekerjaan yang tidak produktif selamanya. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, inequality tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Jika keuntungan industrial policy dinikmati pemilik modal sementara biaya fiskal dibayar publik, legitimasi kebijakan akan menurun. Conditionality pada pekerjaan, investasi, atau teknologi dapat memperbaiki pembagian manfaat. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap indonesia menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Indonesia perlu mengaitkan hilirisasi dan investasi asing dengan vocational training, supplier development, keselamatan kerja,

dan jalur karier. Industrial upgrading harus sekaligus menjadi human-capital upgrading. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

22. Indonesia dalam Peta Perdagangan yang Bergeser

Bagian ini membahas Indonesia dalam peta perdagangan yang bergeser sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Trade 2025 perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. BPS mencatat ekspor Indonesia Januari-Desember 2025 mencapai sekitar US\$282,91 miliar dan impor US\$241,86 miliar, menghasilkan surplus sekitar US\$41,05 miliar (BPS, 2026a). Data ini menunjukkan basis perdagangan Indonesia tetap kuat di tengah lingkungan global yang volatil. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi first half 2026 memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Pada Januari-Juni 2026 ekspor mencapai US\$140,81 miliar, sedangkan impor naik lebih cepat menjadi US\$137,24 miliar; surplus periode tersebut sekitar US\$3,58 miliar (BPS, 2026b). Penyempitan surplus mengingatkan bahwa posisi eksternal dapat berubah cepat akibat siklus harga, permintaan, dan impor modal. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan commodity exposure. Komoditas dan produk berbasis sumber daya tetap penting. Ketika harga dunia naik, penerimaan ekspor membaik; ketika harga turun, ketergantungan menjadi sumber volatilitas. Diversifikasi manufaktur dan jasa merupakan agenda ketahanan. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara

asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, market diversification tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Hubungan Indonesia dengan Tiongkok, ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, India, dan Timur Tengah memberikan portofolio pasar yang relatif luas. Diversifikasi geografis perlu diikuti diversifikasi produk dan teknologi. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap strategic location menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Letak Indonesia di jalur Indo-Pasifik dan ukuran pasar domestiknya meningkatkan daya tawar. Namun geografi hanya menjadi keunggulan jika logistik, energi, regulasi, dan talenta mampu mengubahnya menjadi produktivitas. Position is not capability; policy determines conversion. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

23. Hilirisasi Indonesia: Antara Nilai Tambah dan Ketergantungan Baru

Bagian ini membahas hilirisasi Indonesia: antara nilai tambah dan ketergantungan baru sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Rationale perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Hilirisasi berupaya menghentikan pola ekspor bahan mentah dan menciptakan investasi pemrosesan, pekerjaan, basis pajak, serta kemampuan industri. Secara ekonomi politik, hilirisasi juga meningkatkan bargaining power terhadap investor dan pembeli. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi success metrics memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Keberhasilan tidak cukup diukur dari nilai ekspor produk olahan. Perlu dilihat domestic value added, produktivitas, pemasok lokal, transfer teknologi, emisi, dan kualitas pekerjaan. Smelter dengan input impor besar dan keterkaitan lokal rendah dapat

menghasilkan angka ekspor tinggi tetapi pembelajaran terbatas. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan dependency. Hilirisasi dapat menciptakan ketergantungan baru pada modal, teknologi, atau pasar dari kelompok investor tertentu. Diversifikasi investor dan kemampuan nasional mengoperasikan teknologi menjadi penting. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, energy footprint tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Industri pemrosesan mineral sangat intensif energi. Jika listrik berasal dari sumber berkarbon tinggi, produk menghadapi risiko regulasi hijau di pasar global. Integrasi hilirisasi dan transisi energi menjadi keharusan strategis. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap next stage menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Tahap berikut adalah downstream sophistication: material maju, komponen, engineering, recycling, R&D, dan industri pengguna akhir. Nilai terbesar dalam rantai sering berada pada pengetahuan, desain, dan layanan, bukan pemrosesan dasar. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

24. Open Strategic Resilience sebagai Pilihan Indonesia

Bagian ini membahas open strategic resilience sebagai pilihan Indonesia sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan,

dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Bukan autarki perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Indonesia tidak memiliki kepentingan menjadi ekonomi tertutup. Pasar, investasi, teknologi, dan pembiayaan internasional tetap dibutuhkan untuk pertumbuhan dan transformasi. Kedaulatan yang sehat bukan berarti memproduksi semuanya sendiri. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi selective capability memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Negara perlu menentukan kapabilitas yang benar-benar strategis: pangan tertentu, energi, pembayaran, cybersecurity, data publik, obat penting, serta beberapa teknologi industri. Sektor lain dapat mengandalkan integrasi global dengan diversifikasi sumber. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan open resilience. Open strategic resilience berarti mempertahankan keterbukaan sambil mengurangi single-point dependency dan memperbesar kemampuan substitusi. Konsep ini menggabungkan competitiveness, security, dan optionality. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, diplomacy tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Diplomasi ekonomi bebas-aktif perlu diterjemahkan menjadi portofolio perjanjian, investor, teknologi, dan akses pasar yang saling melengkapi. Netralitas bukan pasif, melainkan kemampuan bernegosiasi dengan banyak pihak. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap governance menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Strategi semacam ini membutuhkan koordinasi antarkementerian, data dependency, evaluasi investasi, dan komunikasi publik yang

konsisten. Tanpa governance, istilah strategis mudah menjadi alasan proteksi sektoral yang tidak disiplin. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

25. Skenario Ekonomi Politik Global Menuju 2035

Bagian ini membahas skenario ekonomi politik global menuju 2035 sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Managed multipolarity perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Skenario pertama adalah multipolaritas terkelola: rivalitas besar berlanjut tetapi aturan dasar perdagangan tetap berfungsi. Negara melakukan de-risking pada sektor sensitif sambil mempertahankan integrasi luas. Ini adalah skenario paling kondusif bagi negara menengah yang mampu bermain pada banyak jaringan. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi hard blocs memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Skenario kedua adalah pembentukan blok keras dengan pembatasan teknologi, pembayaran, investasi, dan perdagangan yang lebih dalam. Biaya efisiensi meningkat dan negara ketiga menghadapi tekanan memilih ekosistem teknologi serta keamanan. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan green-tech race. Skenario ketiga ditandai perlombaan hijau dan AI yang sangat cepat. Kebijakan industri mempercepat inovasi tetapi juga memperbesar subsidi dan konsentrasi teknologi. Pemenang adalah negara dengan listrik murah, talenta, mineral, modal, dan institusi yang mampu mengkoordinasikan investasi. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah

pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, krisis cascade tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Skenario keempat adalah rangkaian krisis: konflik, iklim ekstrem, debt distress, dan gangguan logistik terjadi berdekatan sehingga kemampuan multilateral kewalahan. Resilience domestik dan kerja sama regional menjadi penyangga utama. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap Indonesia strategy menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Indonesia tidak dapat memilih satu prediksi. Kebijakan sebaiknya dibangun robust across scenarios: diversifikasi, fiscal space, human capital, energy transition, food resilience, and digital capacity. Strategi yang tahan berbagai masa depan lebih berharga daripada ramalan yang terlihat presisi tetapi rapuh. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

26. Implikasi bagi Manajemen Strategik dan Dunia Usaha

Bagian ini membahas implikasi bagi manajemen strategik dan dunia usaha sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Geopolitical mapping perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Perusahaan perlu memetakan exposure menurut negara, pemasok, teknologi, mata uang, data, shipping route, dan aturan. Risiko tidak cukup diklasifikasikan berdasarkan pasar penjualan. Dependency map membantu mengidentifikasi chokepoint yang tersembunyi. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi scenario planning memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Perencanaan skenario harus diterapkan pada keputusan investasi besar. Perusahaan perlu menguji strategi terhadap tarif baru, sanksi,

penutupan rute, kenaikan energi, dan perubahan regulasi karbon. Tujuannya bukan memprediksi, tetapi mempersiapkan opsi. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan supply chain design. Strategi sourcing harus menyeimbangkan cost, quality, lead time, concentration, geopolitical alignment, dan substitutability. Supplier kedua yang sedikit lebih mahal dapat memiliki nilai insurance yang besar. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, strategic finance tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Treasury perlu memikirkan currency exposure, sanctions risk, trade finance, dan akses likuiditas lintas yurisdiksi. Ketahanan finansial menjadi bagian dari competitive strategy. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap leadership menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Pemimpin di era pasca-globalisasi harus memahami ekonomi politik, bukan hanya pasar. Keputusan komersial dapat berubah karena tindakan negara dalam hitungan hari. Strategic literacy kini mencakup geopolitics, technology, climate, and regulation. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

27. Implikasi bagi Pendidikan Tinggi dan Pengajaran Manajemen

Bagian ini membahas implikasi bagi pendidikan tinggi dan pengajaran manajemen sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan,

lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Curriculum perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Pendidikan manajemen perlu menghubungkan ekonomi internasional dengan geopolitik, teknologi, keberlanjutan, dan kebijakan publik. Model bisnis tidak dapat dianalisis seolah-olah aturan tetap netral. Mahasiswa perlu memahami mengapa keputusan negara mengubah struktur biaya dan peluang perusahaan. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi case method memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Kasus semikonduktor, nikel, CBAM, sanksi, dan friend-shoring dapat digunakan untuk mengajarkan trade-off antara efficiency dan resilience. Kasus semacam ini melatih kemampuan mengambil keputusan di bawah ketidakpastian. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan data literacy. Analisis pasca-globalisasi membutuhkan data perdagangan, input-output, FDI, shipping, energy, patents, and regulatory databases. Kemampuan membaca data menjadi pelengkap teori ekonomi politik. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, ai tools tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. AI dapat membantu scenario generation, policy scanning, dan competitive intelligence, tetapi keluaran perlu diverifikasi terhadap sumber resmi. Literasi AI perlu disertai epistemic discipline dan pemahaman bias. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap ipb university menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Bagi IPB University, tema ini relevan karena pangan, bioekonomi, sumber daya alam, lingkungan, agribisnis, dan pembangunan wilayah semakin terkait dengan geoekonomi. Keunggulan disipliner dapat dipadukan dengan manajemen

strategik dan kebijakan global. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

28. Penutup: Dunia yang Bergeser dan Pilihan Strategis Indonesia

Bagian ini membahas penutup: dunia yang bergeser dan pilihan strategis Indonesia sebagai komponen dari perubahan struktur ekonomi dunia. Pembahasan menekankan bahwa pergeseran pasca-globalisasi bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi perubahan perdagangan, teknologi, kebijakan industri, keamanan, lingkungan, dan politik domestik. Dengan membaca hubungan sebab-akibat di antara unsur tersebut, kita dapat membedakan perubahan yang bersifat siklis dari perubahan yang mengubah aturan permainan jangka panjang.

Tidak berakhir perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Globalisasi tidak berhenti; ia berubah dari proyek efisiensi menjadi arena negosiasi antara efisiensi, keamanan, legitimasi politik, dan keberlanjutan. Arus perdagangan tetap besar, tetapi jalurnya semakin dipengaruhi negara dan geopolitik. Pada tingkat mikro, perubahan tersebut memengaruhi lokasi investasi, kontrak pemasok, pengelolaan inventori, dan keputusan teknologi. Pada tingkat makro, dampaknya masuk melalui perdagangan, harga, lapangan kerja, arus modal, serta posisi fiskal. Perbedaan dengan era sebelumnya terletak pada masuknya pertimbangan keamanan dan legitimasi ke dalam kalkulasi komersial. Apa yang dahulu dinilai sebagai keputusan perusahaan kini dapat menjadi isu hubungan luar negeri. Bagi Indonesia, implikasinya adalah perlunya menghubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi domestik. Akses pasar tidak banyak berarti bila perusahaan lokal tidak mampu memenuhi standar, sedangkan investasi asing tidak menghasilkan upgrading bila tidak terdapat pemasok dan tenaga terampil.

Dimensi state-market synthesis memperlihatkan perubahan logika ekonomi global. Negara kembali kuat, tetapi pasar dan perusahaan global tetap menentukan inovasi serta investasi. Tantangan utama adalah menemukan sintesis yang menghindari laissez-faire naif dan proteksionisme tidak produktif. Institusi berkualitas menentukan apakah kebijakan strategis menghasilkan upgrading atau rent-seeking. Dampaknya bersifat tidak simetris. Negara dan perusahaan yang memiliki alternatif pemasok, pasar, teknologi, serta pembiayaan dapat beradaptasi lebih cepat dibanding pihak yang bergantung pada satu jaringan. Kebijakan yang terlalu agresif juga memiliki biaya. Duplikasi kapasitas, proteksi permanen, dan subsidi tanpa disiplin dapat menurunkan produktivitas serta mengundang retaliasi. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini menuntut fungsi intelijen pasar dan geopolitik yang lebih kuat. Keunggulan tidak lagi hanya berasal dari biaya tenaga kerja atau bahan baku, tetapi juga reliability, compliance, traceability, dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu pergeseran terpenting berkaitan dengan Indonesia opportunity. Indonesia memiliki ukuran pasar, lokasi, sumber daya, demografi, dan diplomasi yang memberi ruang manuver besar. Namun peluang tersebut hanya berubah menjadi kekuatan bila didukung produktivitas, teknologi, energi bersih, dan manusia terampil. Pergeseran ini juga menciptakan distribusi pemenang dan pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari output agregat, melainkan dari siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya penyesuaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua ketergantungan buruk. Interdependensi tetap menjadi sumber efisiensi dan perdamaian, tetapi ketergantungan yang terkonsentrasi pada chokepoint tertentu dapat berubah menjadi leverage politik. Implikasi lain adalah pentingnya data dependency. Pemerintah perlu

mengetahui input kritis, negara asal, substitusi, lead time, teknologi yang terkunci, dan perusahaan yang menguasai setiap simpul agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan persepsi semata.

Dari perspektif ekonomi politik, principle tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Keterbukaan harus dipertahankan karena kemakmuran Indonesia bergantung pada perdagangan dan investasi. Pada saat yang sama, dependency kritis harus dikenali dan dikelola. Open strategic resilience adalah prinsip yang lebih sesuai daripada pilihan biner globalisasi versus nasionalisme. Mekanismenya bekerja melalui perubahan insentif. Ketika risiko politik atau regulasi meningkat, perusahaan mengubah hurdle rate, memperpendek horizon, menambah opsi substitusi, atau meminta premi harga untuk ketidakpastian. Kuncinya adalah proporsionalitas: risiko yang benar-benar strategis memerlukan perlindungan, sedangkan sektor biasa sebaiknya tetap tunduk pada kompetisi dan disiplin pasar. Indonesia juga perlu menghindari kebijakan simbolik yang mengejar “kemandirian” tanpa perhitungan biaya. Kedaulatan yang produktif justru muncul ketika negara memiliki kapasitas untuk memilih kapan memproduksi sendiri, kapan bermitra, dan kapan mengimpor.

Pembacaan terhadap final menunjukkan mengapa kategori lama tidak lagi cukup. Dunia yang bergeser menuntut kemampuan untuk membaca perubahan sebelum menjadi krisis, membangun pilihan sebelum pilihan tertutup, dan memperkuat kapasitas sebelum ketergantungan berubah menjadi kerentanan. Kebijakan terbaik adalah yang membuat Indonesia tetap bebas bertindak dalam berbagai konfigurasi ekonomi politik global. Konsekuensi utamanya adalah perubahan arti efisiensi. Biaya terendah pada kondisi normal belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kemungkinan gangguan memiliki kerugian besar dan waktu pemulihan panjang. Karena itu, strategi rasional bukan menarik diri dari jaringan global, melainkan membedakan antara hubungan yang produktif dan dependency yang menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks Indonesia, prioritas harus diberikan pada peningkatan pilihan. Semakin banyak pasar, pemasok, sumber teknologi, moda energi, dan kanal pembiayaan yang dapat digunakan, semakin kecil kemungkinan satu guncangan eksternal melumpuhkan strategi nasional.

Matriks Pergeseran: Globalisasi Lama dan Pasca-Globalisasi

Dimensi	Globalisasi/Hiper-Globalisasi	Pasca-Globalisasi	Implikasi Strategis
Tujuan perusahaan	efisiensi biaya dan skala	efisiensi + resilience + compliance	risk-adjusted optimization
Rantai pasok	just-in-time, pemasok terkonsentrasi	multi-sourcing, just-in-case, regionalisasi selektif	redundansi terukur
Peran negara	liberalisasi dan aturan horizontal	kebijakan industri, screening, security	negara lebih selektif dan intervensif
Perdagangan	tarif menurun dan integrasi luas	tarif, kontrol ekspor, friend-shoring	market access makin politis
Teknologi	difusi dan outsourcing global	chokepoint, export control, sovereign capacity	teknologi menjadi aset strategis
Energi	komoditas berorientasi biaya	security of supply + transisi hijau	diversifikasi dan storage

Keuangan	integrasi dan optimalisasi modal	sanctions, payment resilience, local currency	jurisdiction risk meningkat
Lingkungan	externality terpisah dari trade	carbon border, traceability, green subsidies	carbon competitiveness
Data	arus lintas batas berkembang cepat	privacy, sovereignty, fragmented rules	interoperabilitas dan keamanan
Diplomasi	perjanjian liberalisasi	multi-alignment dan geoeconomics	strategic optionality

Sepuluh Prinsip Kebijakan untuk Indonesia

- 1. Keterbukaan yang tahan guncangan:** Pertahankan perdagangan dan investasi sebagai sumber produktivitas, tetapi identifikasi dependency yang dapat mengganggu fungsi ekonomi bila satu pemasok atau satu yurisdiksi terputus.
- 2. Diversifikasi, bukan decoupling:** Perluas pasar ekspor, asal impor, investor, teknologi, dan pembiayaan agar hubungan dengan satu mitra tidak berubah menjadi constraint strategis.
- 3. Kebijakan industri dengan disiplin:** Fokus pada market failure, learning, infrastructure, dan coordination; tetapkan target, conditionality, sunset clause, serta evaluasi sehingga dukungan tidak menjadi hak permanen.
- 4. Hilirisasi menuju kapabilitas:** Ukur keberhasilan melalui domestic value added, teknologi, pemasok, keterampilan, R&D, dan emisi, bukan hanya perubahan nilai ekspor.
- 5. Integrasikan transisi hijau dan strategi perdagangan:** Bangun listrik rendah karbon, sistem pengukuran emisi, traceability, dan green finance agar produk Indonesia kompetitif di pasar yang menerapkan standar karbon.
- 6. Bangun digital sovereignty yang terbuka:** Perkuat data governance, cybersecurity, cloud, AI talent, dan interoperabilitas regional tanpa mengisolasi ekonomi digital dari inovasi global.
- 7. Perkuat ASEAN dan RCEP:** Gunakan regionalisme sebagai platform diversifikasi, rules of origin, integrasi pemasok, jasa digital, dan collective bargaining dengan ekonomi besar.
- 8. Kembangkan economic intelligence:** Bangun sistem yang memonitor perdagangan, sanksi, aturan, critical inputs, shipping, teknologi, dan risiko geopolitik secara real time untuk mendukung keputusan.
- 9. Lindungi manusia selama transformasi:** Hubungkan investasi dan restrukturisasi dengan reskilling, keselamatan, social protection, dan mobilitas tenaga kerja agar legitimasi perubahan tetap kuat.
- 10. Jaga policy credibility:** Dalam dunia tidak pasti, kepastian regulasi, konsistensi kontrak, kualitas institusi, dan stabilitas makro adalah bentuk daya saing yang semakin bernilai.

Glossarium

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Instrumen Uni Eropa yang mengaitkan impor barang tertentu dengan harga karbon embedded dalam produksinya; fase definitif dimulai pada 2026.

Chokepoint: Simpul penting dalam jaringan produksi, teknologi, keuangan, atau logistik yang sulit digantikan dan dapat menjadi sumber daya tawar.

Decoupling: Pemisahan hubungan ekonomi atau teknologi secara luas antara negara atau blok yang sebelumnya saling terintegrasi.

De-risking: Pengurangan ketergantungan pada titik-titik yang dinilai berisiko tanpa memutus hubungan ekonomi secara menyeluruh.

Friend-shoring: Pemindahan atau konsentrasi rantai pasok ke negara yang dianggap mitra politik atau keamanan yang lebih terpercaya.

Goeconomic fragmentation: Pergeseran perdagangan, investasi, teknologi, dan arus lain akibat pertimbangan geopolitik dan keamanan yang memperlemah integrasi lintas blok.

Geoekonomi: Penggunaan instrumen ekonomi untuk tujuan strategis dan penggunaan pertimbangan geopolitik dalam kebijakan ekonomi.

Global Value Chain (GVC): Jaringan lintas negara di mana tahapan desain, input, produksi, pemrosesan, logistik, pemasaran, dan layanan dibagi di berbagai lokasi.

Green industrial policy: Kebijakan negara yang secara aktif mendorong industri rendah karbon melalui insentif, pembiayaan, regulasi, pengadaan, atau investasi publik.

Hilirisasi: Strategi meningkatkan pengolahan dan nilai tambah domestik dari sumber daya atau komoditas sebelum dipasarkan.

Industrial policy: Kebijakan yang sengaja mengubah struktur kegiatan ekonomi dengan mendorong sektor, teknologi, atau kapabilitas tertentu.

Interdependence: Ketergantungan timbal balik antarpelaku atau negara karena transaksi dan jaringan lintas batas.

Nearshoring: Pemindahan kegiatan produksi lebih dekat ke pasar utama untuk mengurangi waktu, biaya, dan risiko logistik.

Open strategic autonomy: Pendekatan yang mempertahankan keterbukaan tetapi mengurangi ketergantungan strategis dan memperkuat kemampuan bertindak mandiri.

Open strategic resilience: Kerangka yang diusulkan dalam artikel ini: tetap terintegrasi dengan ekonomi global sambil membangun diversifikasi, kemampuan substitusi, kapasitas strategis, dan pilihan kebijakan.

Political trilemma: Gagasan bahwa integrasi ekonomi mendalam, kedaulatan nasional, dan demokrasi massa sulit dimaksimalkan secara bersamaan.

Resilience: Kemampuan sistem menahan guncangan, pulih, beradaptasi, dan bila perlu bertransformasi.

Strategic autonomy: Kemampuan suatu negara atau kawasan mengambil keputusan dan mempertahankan fungsi penting tanpa ketergantungan eksternal yang berlebihan.

Strategic optionality: Ketersediaan berbagai pilihan pemasok, pasar, teknologi, pembiayaan, dan kebijakan ketika lingkungan berubah.

Weaponized interdependence: Pemanfaatan posisi dominan pada jaringan ekonomi, teknologi, informasi, atau keuangan untuk memperoleh informasi atau membatasi akses pihak lain.

Daftar Pustaka

- Aiyar, S., Chen, J., Ebeke, C. H., Garcia-Saltos, R., Gudmundsson, T., Ilyina, A., Kangur, A., Kunaratskul, T., Rodriguez, S. L., Ruta, M., Schulze, T., Soderberg, G., & Trevino, J. P. (2023). Geoeconomic fragmentation and the future of multilateralism. IMF Staff Discussion Notes, 2023(001).
<https://doi.org/10.5089/9798400229046.006>
- Alvarez, J. A., Benatiya Andaloussi, M., Maggi, C., Sollaci, A., Stuermer, M., & Topalova, P. (2023). Geoeconomic fragmentation and commodity markets. IMF Working Papers, 2023(201).
<https://doi.org/10.5089/9798400252426.001>
- Antràs, P. (2020). Conceptual aspects of global value chains. The World Bank Economic Review, 34(3), 551-574. <https://doi.org/10.1093/wber/lhaa006>
- Antràs, P. (2020). De-globalisation? Global value chains in the post-COVID-19 age (NBER Working Paper No. 28115). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w28115>
- Antràs, P., & Chor, D. (2021). Global value chains (NBER Working Paper No. 28549). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w28549>
- Baba, C., Lan, T., Mineshima, A., Misch, F., Pinat, M., Shahmoradi, A., Yao, J., & van Elkan, R. (2023). Geoeconomic fragmentation: What's at stake for the EU. IMF Working Papers, 2023(245).
<https://doi.org/10.5089/9798400259098.001>
- Bolhuis, M. A., Chen, J., & Kett, B. R. (2023). Fragmentation in global trade: Accounting for commodities. IMF Working Papers, 2023(073). <https://doi.org/10.5089/9798400236563.001>
- Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. International Security, 44(1), 42-79. https://doi.org/10.1162/isec_a_00351
- OECD. (2025). The market implications of industrial subsidies (OECD Trade Policy Papers No. 296). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e40b793f-en>
- Rodrik, D. (2000). How far will international economic integration go? Journal of Economic Perspectives, 14(1), 177-186. <https://doi.org/10.1257/jep.14.1.177>
- Rodrik, D. (2018). Populism and the economics of globalization. Journal of International Business Policy, 1(1-2), 12-33. <https://doi.org/10.1057/s42214-018-0001-4>
- International Monetary Fund. (2025). Unlocking MENA and CCA trade in a fragmented world (IMF Working Paper No. 2025/267). <https://doi.org/10.5089/9798229034463.001>
- World Trade Organization. (2025). Annual report 2025. WTO.
- World Trade Organization. (2026a). Global trade outlook and statistics - March 2026. WTO.
- World Trade Organization, Asian Development Bank, Institute of Developing Economies-JETRO, & partners. (2025). Global value chain development report 2025. WTO.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2026a). Global trade update: January 2026 - Top trends redefining global trade in 2026. United Nations.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2026b). Global trade update: July/August 2026 - Global trade continues to expand amid rising price pressures. United Nations.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2026c). Global trade update: September 2026 - Services are reshaping global trade, but least developed countries lag in digital exports. United Nations.

- United Nations Conference on Trade and Development. (2026d). Key statistics and trends in international trade 2025. United Nations.
- European Commission. (2026). Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM definitive regime. European Commission.
- Badan Pusat Statistik. (2026a). Perkembangan ekspor dan impor Indonesia Desember 2025. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026b). Ekspor dan impor Indonesia Juni 2026 masing-masing tercatat USD25,46 miliar dan USD25,91 miliar. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026c). Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2025. BPS-Statistics Indonesia.
- The White House. (2025). Regulating imports with a reciprocal tariff to rectify trade practices that contribute to large and persistent annual United States goods trade deficits. Executive Order, April 2, 2025.

Sumber Data dan Dokumen Kebijakan Utama (tautan stabil)

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gtos0326_e.pdf

<https://unctad.org/publication/global-trade-update-january-2026-top-trends-redefining-global-trade-2026>

<https://unctad.org/publication/global-trade-update-julyaugust-2026-global-trade-continues-expand-amid-rising-price>

<https://unctad.org/publication/global-trade-update-september-2026-services-are-reshaping-global-trade>

https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-definitive-regime_en

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/02/2537/perkembangan-ekspor-dan-impor.html>

<https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2026/08/03/2597/ekspor-dan-impor-indonesia-juni-2026-masing-masing-tercatat-usd-25-46-miliar-dan-usd-25-91-miliar.html>